

Katalog BPS : 3205005.82

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**



**PROFIL KEMISKINAN
PROVINSI MALUKU UTARA
2015**



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2015

ISBN : 978-602-6755-33-9

No. Publikasi : 82520.1615

Katalog BPS : 3205005.82

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : vii + 58 Halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Desain Sampul : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Maluku Utara

Tahun : 2016

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2015” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015.

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, diucapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus. Saran dan kritik dari berbagai pihak terutama dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, 9 Desember 2016
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA



Drs. Misfaruddin, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	2
1.3. Data Yang Digunakan	2
Bab II Kajian Literatur	3
2.1. Definisi Kemiskinan	3
2.2. Pendekatan Penghitungan Kemiskinan	7
Bab III Metodologi	16
3.1. Penghitungan Kemiskinan	16
3.2. Indikator Kemiskinan	21
3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.....	22
Bab IV Ulasan Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara	27
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara	27
4.2. Jumlah Penduduk Miskin	29
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	31
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	33
4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran.....	35

Bab V	Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Provinsi Maluku Utara .	38
5.1.	Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan).....	39
5.2.	Karakteristik Ketenagakerjaan	43
5.3.	Karakteristik Pendidikan.....	45
5.4.	Program Bantuan kepada Rumah Tangga Miskin	47

<http://malut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan.....	10
Tabel L.1.	Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015	50
Tabel L.2.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015	51
Tabel L.3.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015	52
Tabel L.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011 – 2015.....	53
Tabel L.5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015	54
Tabel L.6.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011 – 2015.....	55
Tabel L.7.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015	56
Tabel L.8.	Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015	57
Tabel L.9.	Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria <i>World Bank</i> Tahun 2015.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz.....	23
Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011-2015.....	27
Gambar 4.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015.....	28
Gambar 4.3.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011-2015.....	29
Gambar 4.4.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015.....	30
Gambar 4.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2011-2015.....	31
Gambar 4.6.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015.....	32
Gambar 4.7.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2011-2015.....	33
Gambar 4.8.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015.....	34
Gambar 4.9.	Perkembangan Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011-2015.....	35
Gambar 4.10.	Perkembangan Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015.....	36
Gambar 4.11.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Tahun 2015 .	37

Gambar 5.1.	Jenis Atap Rumah Tangga Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015.....	39
Gambar 5.2.	Jenis Dinding Rumah Tangga Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015.....	40
Gambar 5.3.	Jenis Lantai Rumah Tangga Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015.....	41
Gambar 5.4.	Sumber Penerangan Rumah Tangga Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015.....	42
Gambar 5.5.	Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin Menurut Sektor di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015.....	43
Gambar 5.6.	Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin Menurut Status di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015	44
Gambar 5.7.	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015.....	45
Gambar 5.8.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Maluku Utara 2015.....	46
Gambar 5.9.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, dan penyajiannya sampai level provinsi baru dimulai tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Selanjutnya mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember), BPS mulai menyajikan data kemiskinan untuk level kabupaten/kota meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2015. Analisis ini juga menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk, serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.3. Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bulan Maret Tahun 2015 terdiri dari 3749 rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Data tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan menurut kabupaten/kota serta analisis karakteristik rumah tangga miskin untuk tingkat provinsi.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan

relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US \$ yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya penduduk Maluku Utara yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.

Adapun kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang Suku Laut.

Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan, “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai surat nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.2. Pendekatan Penghitungan Kemiskinan

2.2.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu, kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi

pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

2.2.2. Pendekatan Rata-rata Per Kapita

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP per kapita per hari, sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor, dan barang-barang lainnya).

Tabel 2.1. Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan

No. Urut	Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan		
			Kota	Desa	K + D
1.	Esmara, 1969/1970 *)	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971 *)	Tingkat Pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	480 360 270	320 240 180	- - -
3.	Ginneken, 1969 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2.000 50
4.	Anne Booth, 1969/1970 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2.000 40
5.	Gupta, 1973 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun	-	-	24.000
6.	Hasan, 1975 *)	Pendapatan minimum per kapita/tahun (US \$)	125	95	-
7.	BPS, 1984	1. Konsumsi kalori per kapita per hari 2. Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	- 13.731	- 7.746	2.100 -
8.	Sayogya, 1984	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	8.240	6.585	-
9.	Bank Dunia, 1984	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6.719	4.479	-
10.	Garis kemiskinan internasional, Interim Report, 1976	Pendapatan per kapita per tahun : - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas daya beli	- -	- -	75 200
11.	Garis kemiskinan internasional, Ahluwalia, 1975 **)	Tingkat pendapatan per kapita per tahun (US \$)			50 75
12.	Rekomendasi dari FAO dan WHO di Roma Tahun 2001 ***)	Batas minimal kalori sesuai kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan bekerja (kkal)	-	-	2100

Keterangan:

- *) Hendra Esmara: Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta: 1986.
 **) Montek S. Ahluwalia, Income Inequality: Some Dimensions of The Problem, dalam Hollis Chenery: Redistribution with Growth, London: University Press, 1974 hlm. 6-10; seperti dikutip oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam Prisma no. 2 tahun IV (April 1975), hlm. 24.
 ***) Jausairi Hasbullah: Tangguh Dengan Statistik, Nuansa Cendekia, Bandung : 2012, hlm. 83.

2.2.3. Pendekatan BKKBN

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Menurut BKKBN, kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB, pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas.

Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan

keluarga kecil/inti. Selain itu, kelima indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

2.2.4. Pendekatan BPS Berdasarkan SPKPM 2000

Pada tahun 2000, BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Luas Lantai Per Kapita:
 - $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1)
 - $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
2. Jenis Lantai:
 - Tanah (skor 1)
 - Bukan Tanah (skor 0)

3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih:
 - Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
 - Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC:
 - Tidak Ada (skor 1)
 - Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset:
 - Tidak Punya Asset (skor 1)
 - Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan):
 - ≤ 350.000 (skor 1)
 - > 350.000 (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan):
 - 80 persen + (skor 1)
 - < 80 persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam):
 - Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
 - Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji *Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Sehingga rumah tangga yang mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin, maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

2.2.5. Pendekatan BPS Berdasarkan PSE05

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring, di mana setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula:

$$I_{RM} = \sum W_i X_i$$

di mana:

W_i = bobot variabel terpilih, dan $\sum W_i = 1$

X_i = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).

I_{RM} = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai I_{RM} diatas, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai I_{RM} terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai I_{RM} maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Penghitungan Kemiskinan

3.1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2015.

3.1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

3.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

$\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.

PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.

P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

PM_p = Penduduk miskin provinsi.

PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana :

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi.

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI = P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

$$\alpha = 0, 1, 2$$

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1), jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2).

- z = Garis kemiskinan
- yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, ..., q), yi < z
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini, akan digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

3.3.1. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1})$$

di mana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

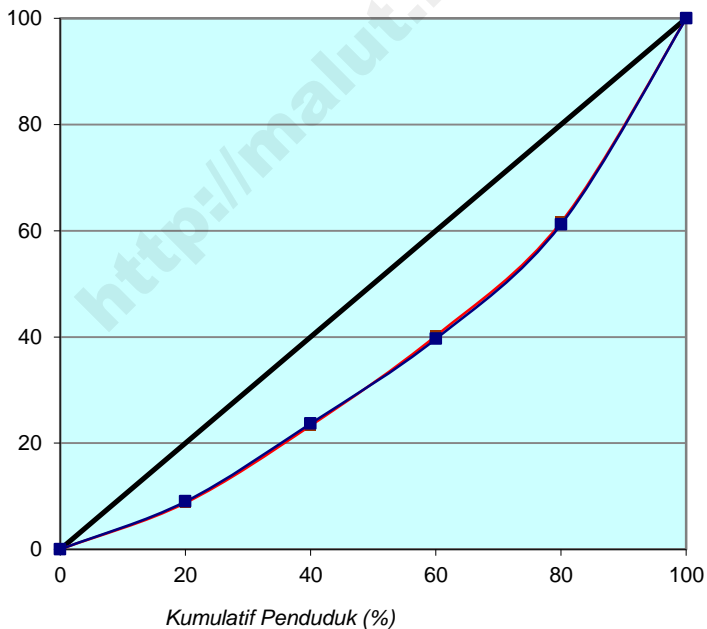
fp_i = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

Gambar 3.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

Kumulatif Pengeluaran (%)



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya sebagai berikut:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- Dapat didekomposisi
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).
- Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.3.2. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

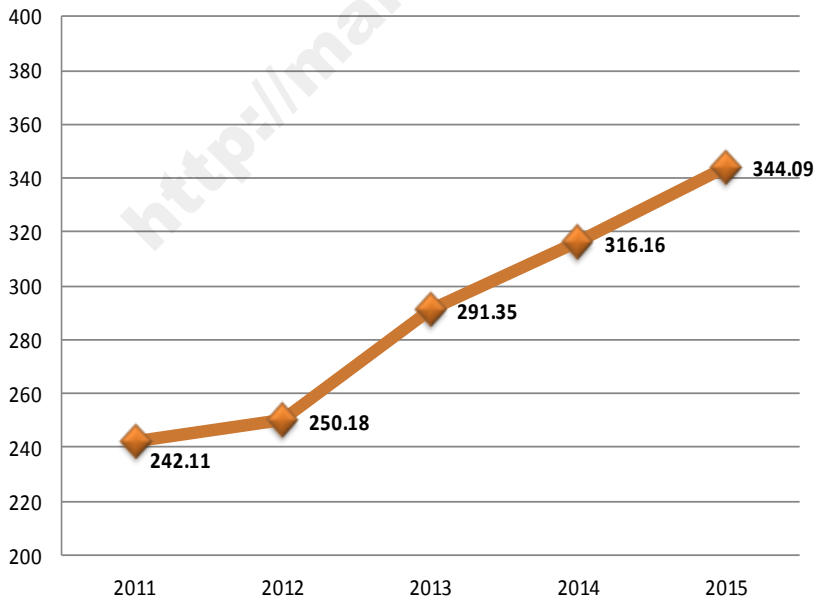
BAB IV

ULASAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA

4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

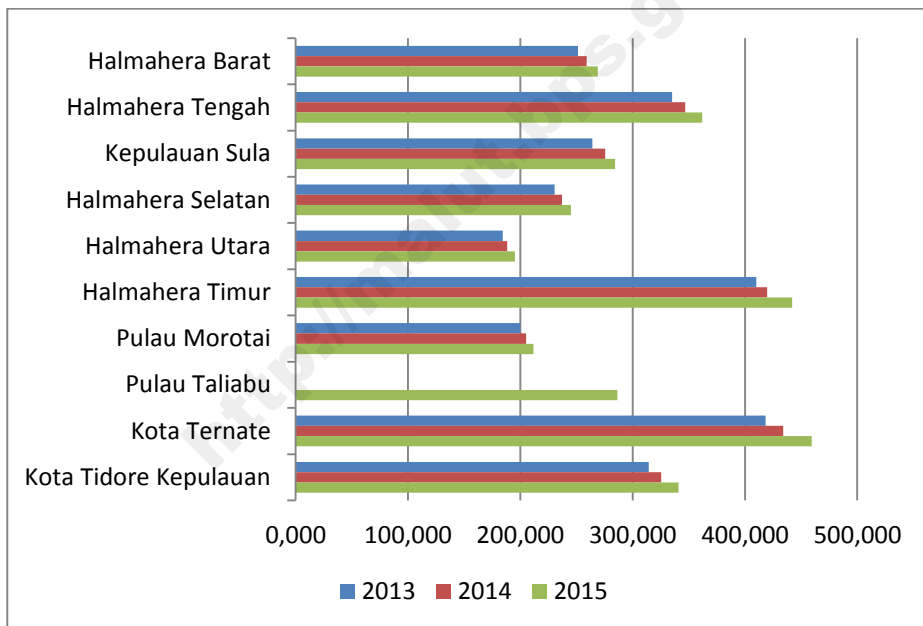
Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)



Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 sebesar Rp.344.088,- naik sebesar 8,83 persen dari tahun 2014 yang sebesar Rp.316.160. Kenaikan garis kemiskinan tersebut tidak sebesar kenaikan pada tahun 2013 (Rp.291.350) yang sebesar 16,45 persen dibandingkan tahun 2012 (Rp.250.180). Jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar Rp.242.110, maka garis kemiskinan tahun 2015 naik sebesar 42,12 persen.

Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015



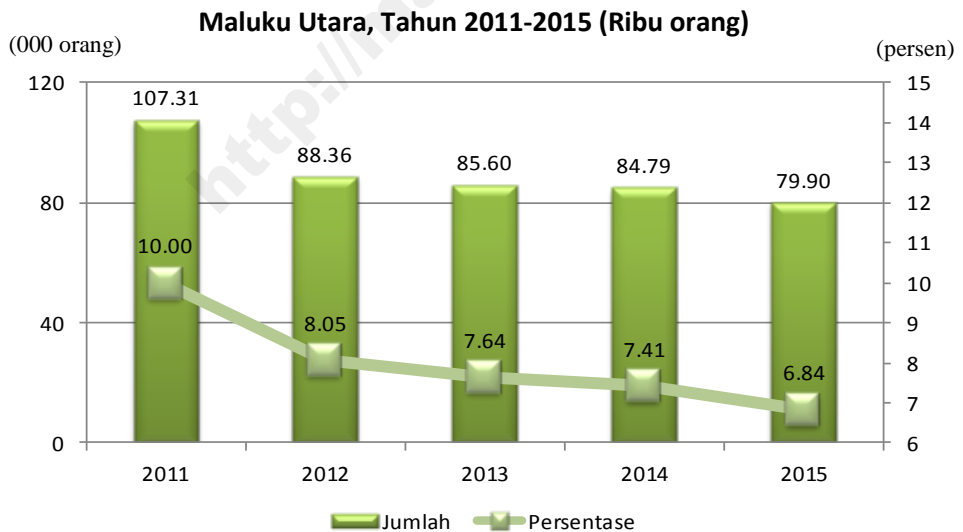
Seperti terlihat dalam Gambar 4.2, garis kemiskinan di Kota Ternate merupakan yang tertinggi di Maluku Utara, yaitu sebesar Rp.459.550,- sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar

Rp.195.090,-. Perbedaan garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga komoditi dalam penghitungan garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, baik komoditi makanan maupun non makanan. Perkembangan garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tersaji dalam Tabel L.1.

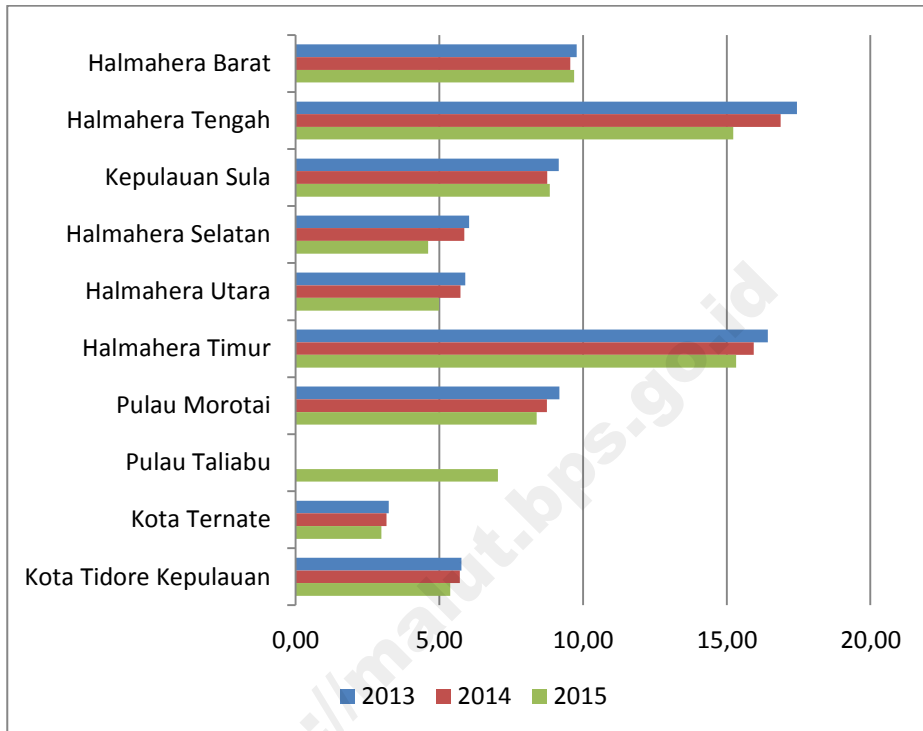
4.2. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan penduduk miskin Maluku Utara berdasarkan Susenas dalam lima tahun terakhir relatif menunjukkan penurunan, baik dari jumlah maupun persentase. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin sekitar 107 ribu orang atau sebesar 10,00 persen penduduk Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin turun menjadi 79,90 ribu orang atau sebesar 6,84 persen penduduk Maluku Utara. Jumlah penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota tersaji dalam Tabel L.2.

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin



Gambar 4.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015

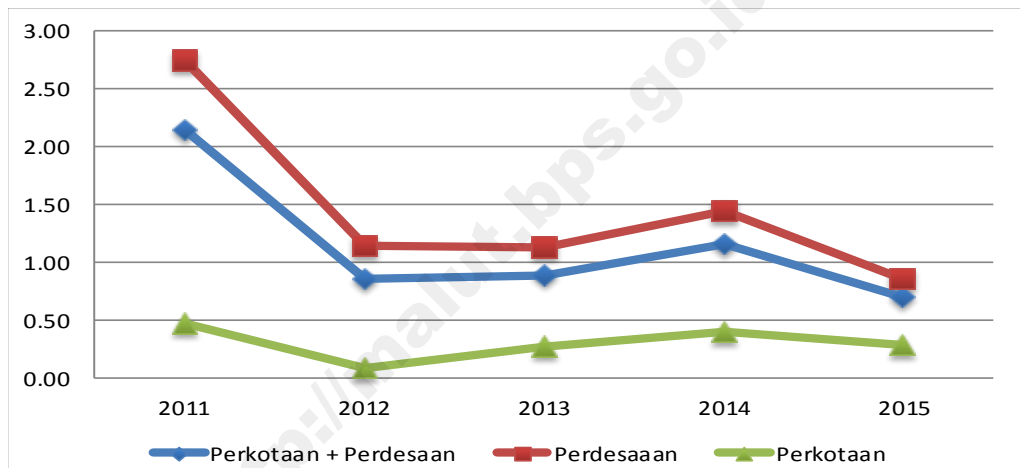


Selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota umumnya mengalami penurunan, seperti terlihat pada Gambar 4.4. Pada tahun 2015 Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 15,33 persen. Sedangkan Kota Ternate memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 2,99 persen. Sebagai kabupaten baru, persentase penduduk miskin di Pulau Taliabu yaitu sebesar 7,04 persen dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran yaitu sebesar 8,85 persen. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.3.

4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index = P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2011-2015

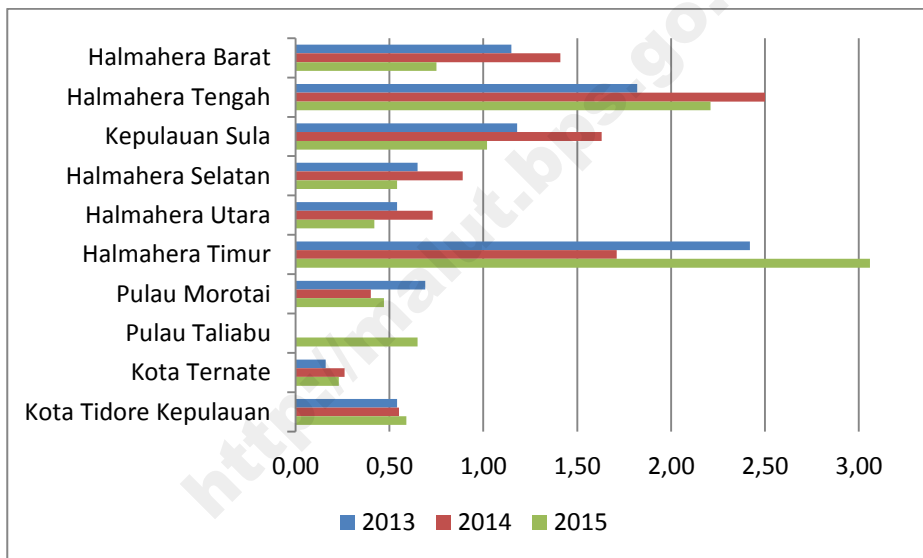


Secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu, yaitu dari 2,14 pada tahun 2011 menjadi 0,70 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Maluku Utara semakin mendekati garis kemiskinan sehingga semakin besar peluang untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Pada daerah perkotaan, terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan yaitu turun menjadi 0,29 dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,40. Begitupula terjadi penurunan P₁ pada daerah perdesaan yang

turun menjadi 0,86 dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,44. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel L4.

Pada tingkat kabupaten/kota, indeks kedalaman kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota pada umumnya mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, seperti tersaji dalam Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015

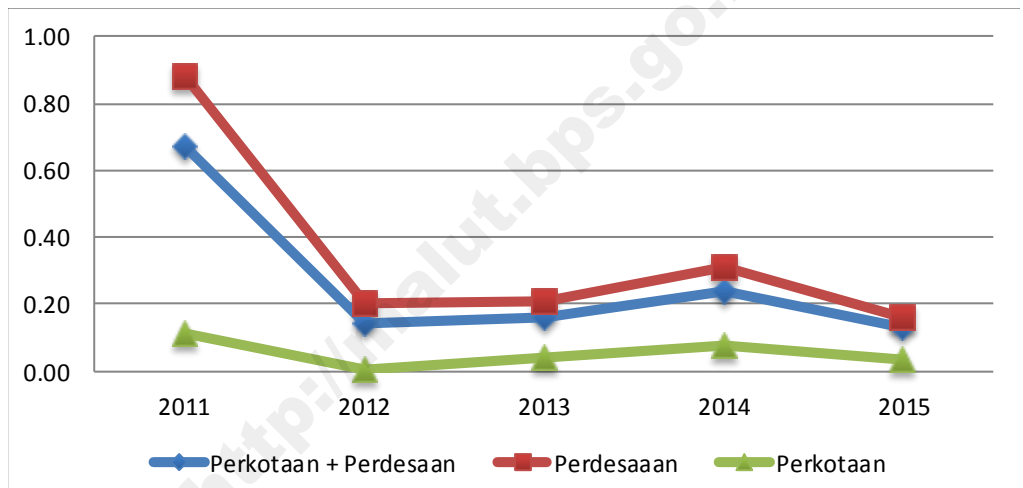


Pada tahun 2015 Kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 3,06 sedangkan yang paling rendah adalah Kota Ternate, yaitu sebesar 0,23. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kota Ternate karena penduduk miskin di Halmahera Timur lebih jauh jaraknya dari garis kemiskinan. Selengkapnya disajikan pada Tabel L.5.

4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index = P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

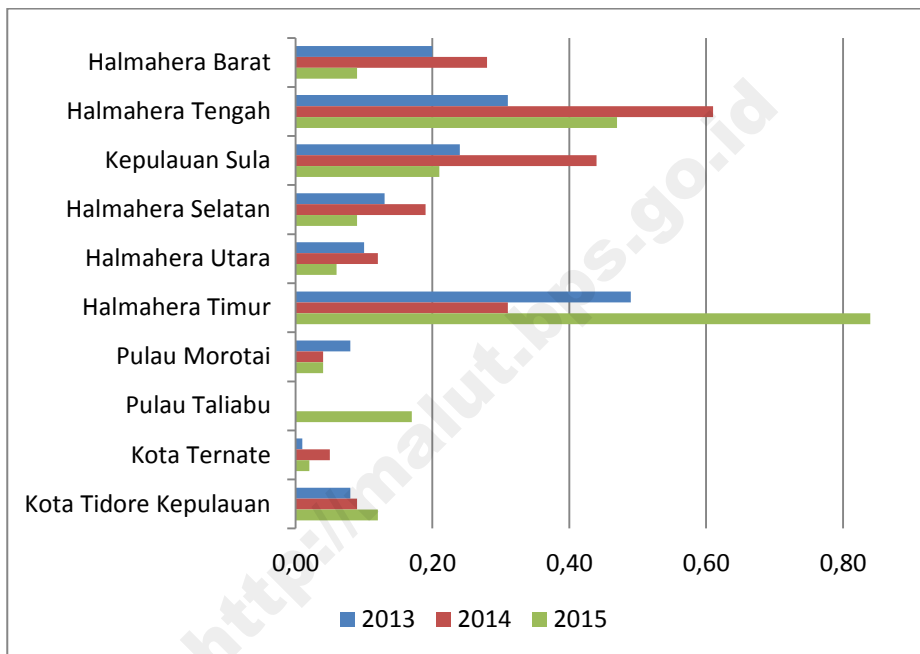
Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2011-2015



Dalam lima tahun terakhir, secara umum indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara cenderung menurun yaitu dari 0,67 pada tahun 2011 menjadi 0,13 pada tahun 2015, seperti terlihat dalam Gambar 4.7. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Maluku Utara semakin berkurang. Pada daerah perkotaan juga mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan yaitu menjadi 0,04 dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,07. Indeks keparahan kemiskinan untuk daerah perdesaan

mengalami penurunan menjadi 0,16 dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,31. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan antara penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.

Gambar 4.8. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015



Pada tingkat kabupaten/kota, indeks kedalaman kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, seperti tersaji dalam Gambar 4.8.

Kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 0,84, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Ternate, yaitu sebesar 0,02. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur lebih besar daripada di

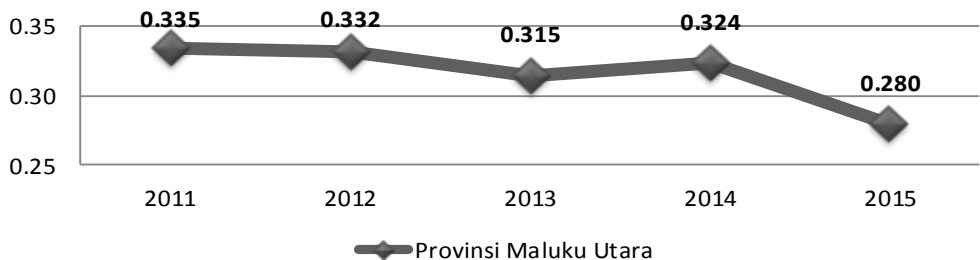
Kota Ternate karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Halmahera Timur lebih beragam. Selengkapnya disajikan pada Tabel L.7.

4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran

Untuk melihat distribusi pengeluaran penduduk sekaligus melihat bagaimana pemerataannya, salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan adalah gini rasio. Dengan dihasilkannya angka gini rasio, akan terdeteksi bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah. Nilai gini rasio selalu berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai gini rasio di bawah 0,3, dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai gini rasio, ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya di atas 0,5.

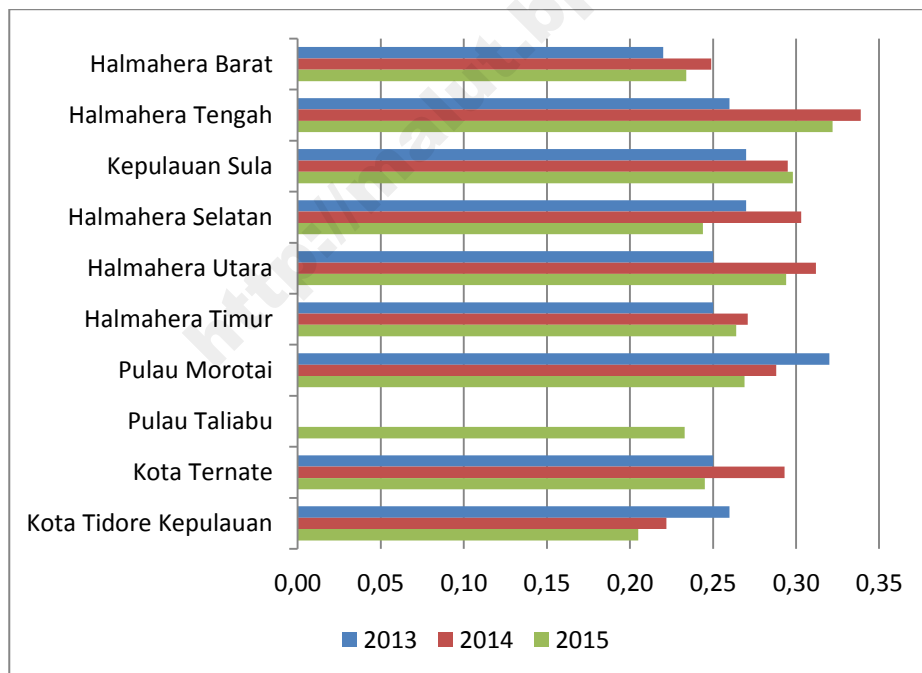
Pada tahun 2015, nilai gini rasio Provinsi Maluku Utara sebesar 0,280, yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara termasuk kategori ketimpangan rendah. Dalam rentang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Maluku Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Tren nilai gini rasio Maluku Utara dari tahun 2011 seperti dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9. Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara, Tahun 2011-2015



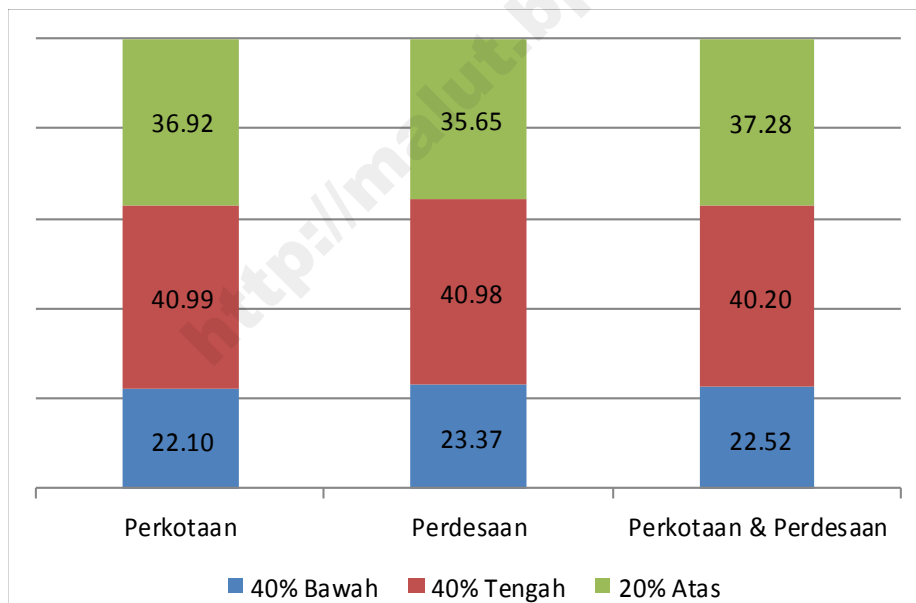
Perkembangan koefisien gini rasio masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 4.10. Pada tahun 2015 hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan nilai gini rasio kecuali Kabupaten Kepulauan Sula yang naik 0,03 poin menjadi 0,298 dibanding tahun 2014 sebesar 0,295. Namun jika diamati pada rentang tahun 2013 hingga 2015 nilai gini rasio hampir semua kabupaten/kota bergerak fluktuatif namun cenderung berada pada kategori rendah dan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara tidak mengalami kendala dalam ketimpangan pengeluaran. Perkembangan koefisien gini rasio selengkapnya tersaji dalam Tabel L.8.

Gambar 4.10. Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015



Indikator lain untuk melihat distribusi pendapatan antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Gambar 4.11. berikut ini menyajikan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia tersebut, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk Maluku Utara, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masih tergolong rendah karena proporsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah masih di atas 17 persen.

Gambar 4.11. Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Tahun 2015 (Persen)



BAB V

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN

DI PROVINSI MALUKU UTARA

Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Di samping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

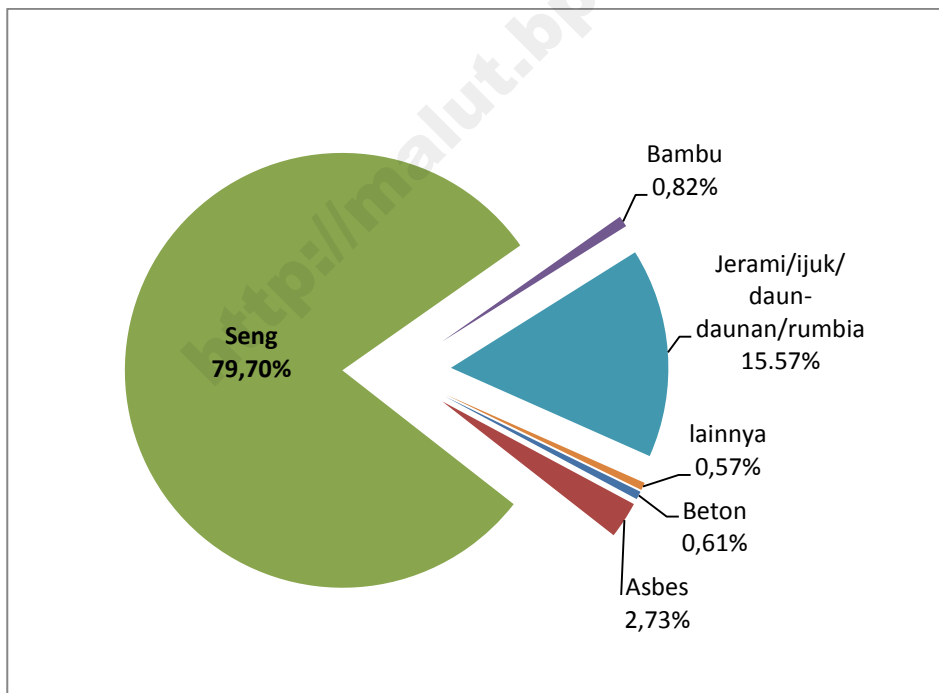
Karakteristik rumah tangga miskin diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat. Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

5.1.1. Jenis Atap

Sebanyak 16 persen rumah tangga miskin menggunakan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia sebagai atap. Sementara itu sebanyak 79,70 persen penduduk miskin memiliki rumah yang beratapkan seng. Penggunaan beton dan genteng di masyarakat Maluku Utara tidak lazim, yang ditunjukkan dengan rendahnya persentase penggunaan kedua jenis atap tersebut, baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin.

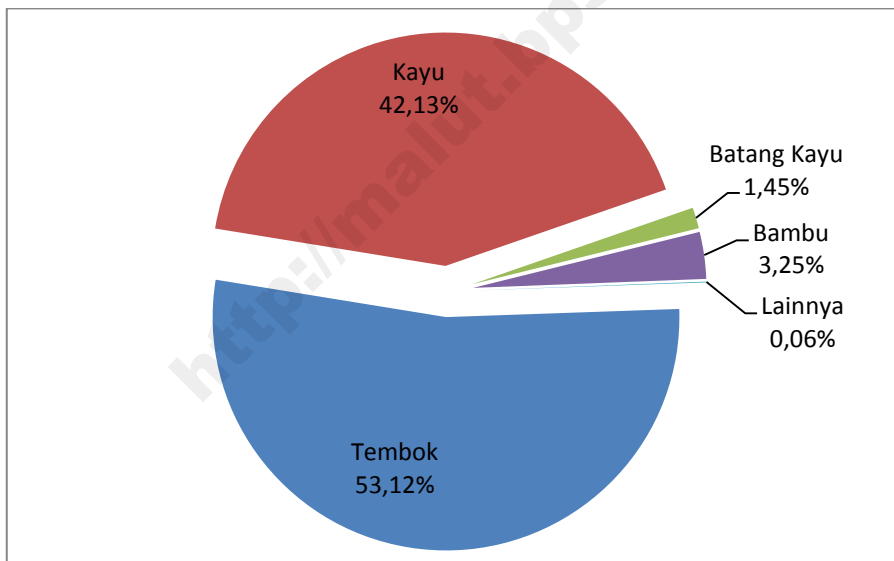
**Gambar 5.1. Jenis Atap Rumah Tangga Miskin
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015**



5.1.2. Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Gambar 5.2 terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Maluku Utara terbuat dari tembok. Separuh rumah tangga miskin atau sebesar 53,12 persen memiliki rumah berdinding tembok. Sebanyak 42,13 persen rumah tangga miskin memiliki rumah berdinding kayu. Sementara itu hanya 1,45 persen rumah tangga miskin memiliki rumah berdinding batang kayu. Rumah berdinding kayu banyak dijumpai pada daerah tepi pantai atau laut.

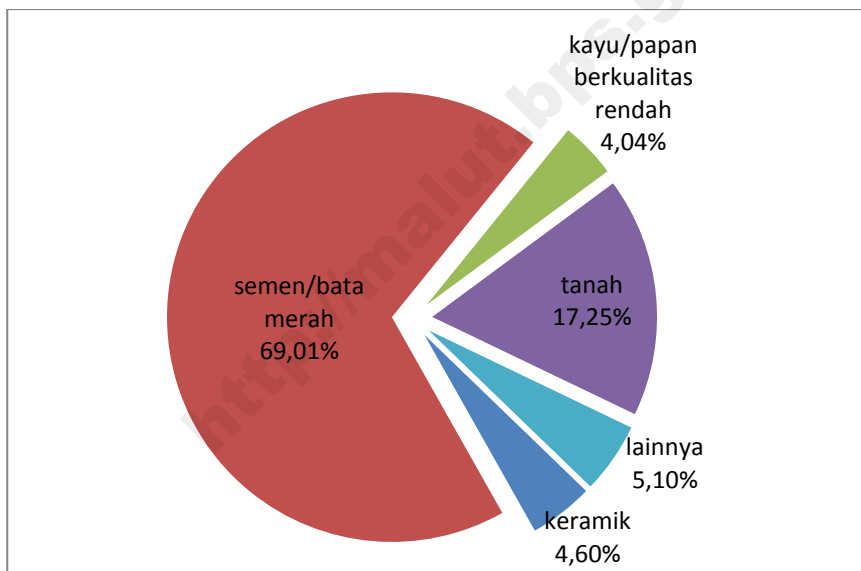
**Gambar 5.2. Jenis Dinding Rumah Tangga Miskin
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015**



5.1.3. Jenis Lantai

Gambar 5.3. menyajikan jenis lantai rumah yang digunakan oleh rumah tangga miskin. Sebanyak 69,01 persen rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki rumah dengan lantai semen/bata merah. Sementara itu terdapat 17,25 persen rumah tangga miskin yang memiliki lantai tanah. Hanya 4,60 persen rumah tangga miskin di Maluku Utara yang menggunakan keramik pada rumah mereka.

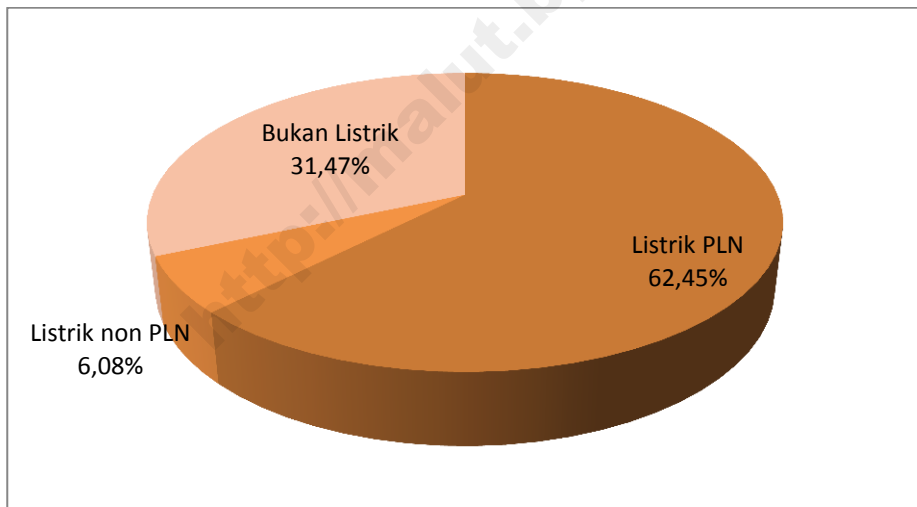
**Gambar 5.3. Jenis Lantai Rumah Tangga Miskin
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015**



5.1.4. Sumber Penerangan

Sebagian besar penduduk Maluku Utara telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama mereka, baik listrik PLN maupun non PLN. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada rumah tangga miskin, sebanyak 62,45 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dan 6,08 persen rumah tangga menggunakan listrik non PLN. Sisanya, sebanyak 31,47 persen rumah tangga masih belum menggunakan listrik. Mereka menggunakan petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lililn dan lainnya sebagai sumber penerangan utama.

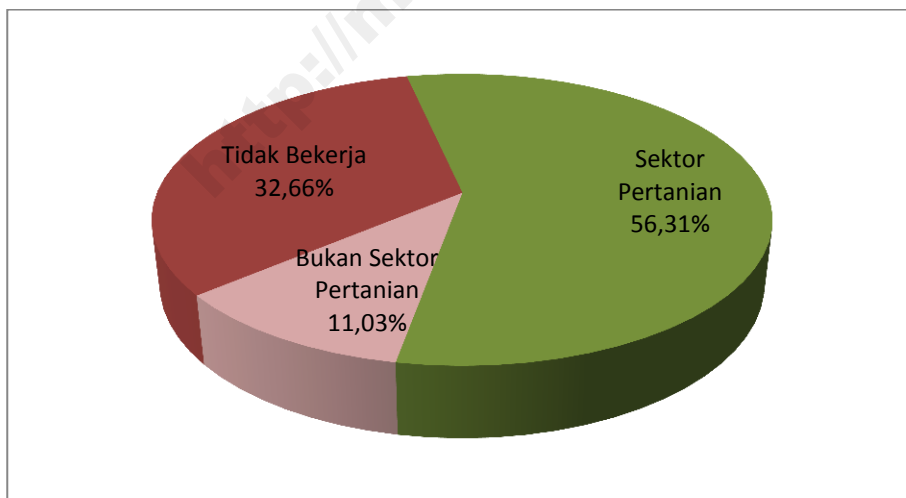
**Gambar 5.4. Sumber Penerangan Rumah Tangga Miskin
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015**



5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

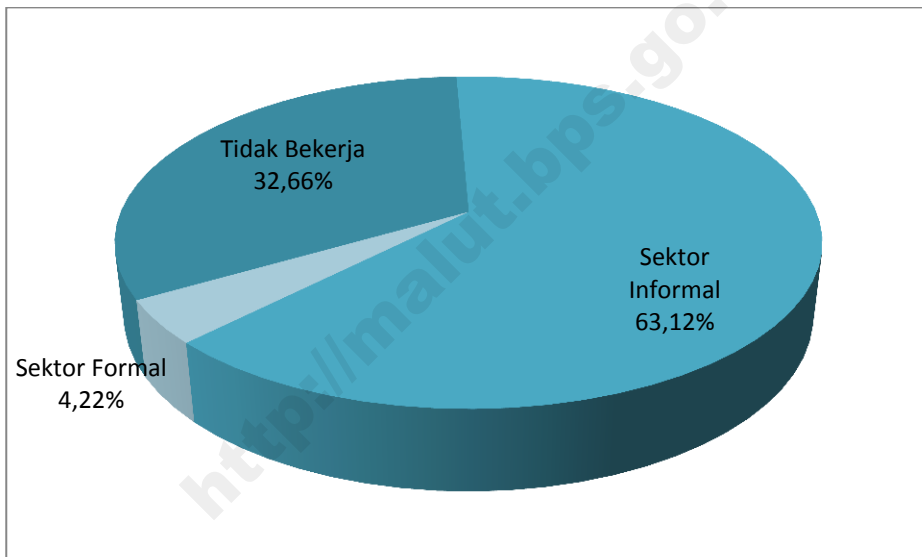
Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat pada mereka yang tidak bekerja atau mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Selain itu penduduk miskin juga cenderung memiliki status bekerja informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/keluarga atau pekerja bebas.

Gambar 5.5. Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin Menurut Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun 2015



Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama rumah tangga disajikan pada Gambar 5.5. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa hampir sepertiga atau 32,66 persen rumah tangga miskin tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu 56,31 persen rumah tangga miskin bekerja pada sektor pertanian. Kemudian sebanyak 11,03 persen rumah tangga miskin yang bekerja pada sektor bukan pertanian.

Gambar 5.6. Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Miskin Menurut Status Provinsi Maluku Utara Tahun 2015



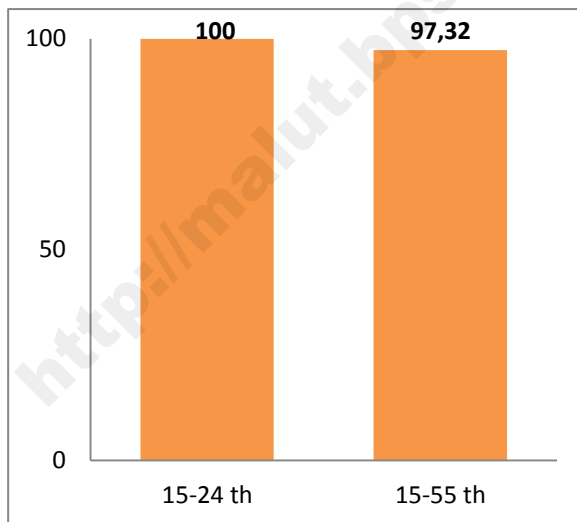
Indikator lain yang dapat mencerminkan kesejahteraan suatu rumah tangga yaitu status pekerjaan. Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama yang disajikan pada Gambar 5.6, terlihat bahwa 63,12 persen rumah tangga miskin memiliki penghasilan utama dengan bekerja pada sektor informal, yaitu sebagai pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga. Sedangkan

yang bekerja di sektor formal hanya 4,22 persen yaitu yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai atau bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

5.3. Karakteristik Pendidikan

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih kecil menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah angka melek huruf (AMH) dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

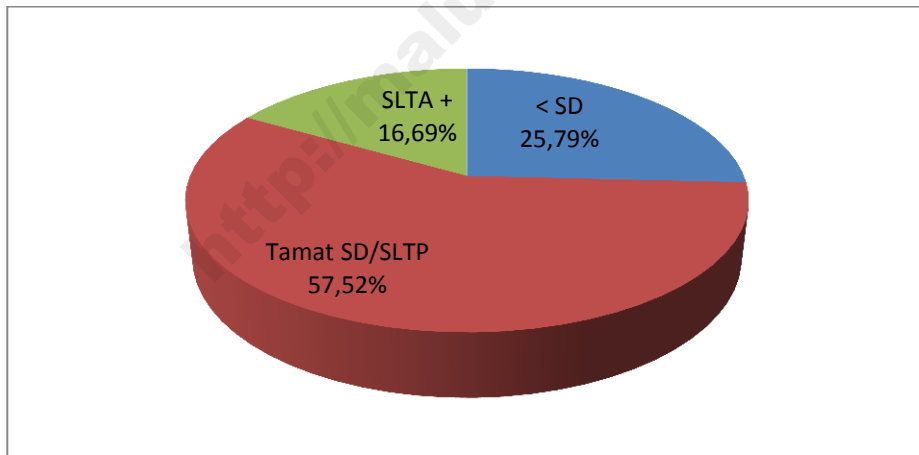
**Gambar 5.7. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015**



Angka melek huruf penduduk miskin menggambarkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Pada publikasi ini AMH dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia 15-24 tahun dan usia 15-55 tahun.

Dari gambar 5.7 dapat dilihat bahwa AMH penduduk miskin untuk kelompok 15-24 tahun yaitu 100, artinya diyakini bahwa semua penduduk miskin usia 15-24 tahun di Maluku Utara dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Sementara itu untuk kelompok usia 15-55 tahun, AMH penduduk miskin yaitu sebesar 97,32. Artinya pada usia antara 25-55 tahun terdapat penduduk miskin yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana.

Gambar 5.8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015



Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan penduduk miskin adalah pendidikan dasar (SD atau SMP), yaitu sebesar 57,52 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA ke atas yang ditamatkan hanya sebesar 16,69 persen. Selain itu sebesar 25,79 persen penduduk miskin yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin memiliki karakteristik pendidikan yang kurang baik atau rendah.

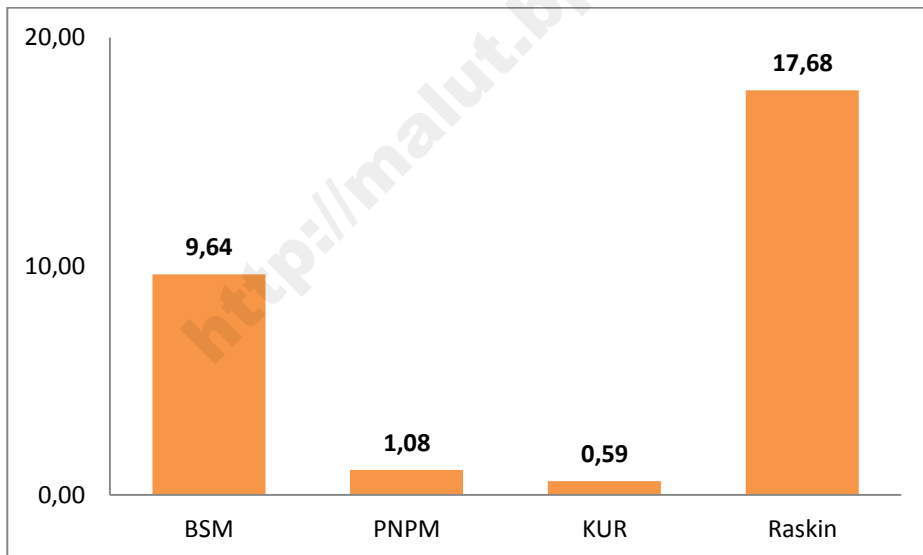
5.4. Program Bantuan kepada Rumah Tangga Miskin

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah melakukan berbagai langkah intervensi yang diwujudkan dalam program penanggulangan kemiskinan, antara lain:

1. Bantuan Siswa Miskin (BSM), adalah program nasional yang bertujuan menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan layak.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), adalah program nasional penanggulan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR), adalah program bantuan dengan skema pembiayaan modal kerja/investasi untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM).
4. Program Subsidi Beras (Raskin), adalah program nasional yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan beras masyarakat berpendapatan rendah.

Seperti terlihat dalam Gambar 5.9, sebanyak 17,68 persen rumah tangga miskin yang baru memperoleh program beras miskin (raskin). Kemudian rumah tangga miskin yang memperoleh program BSM yaitu sebesar 9,64 persen. Sedangkan rumah tangga miskin penerima manfaat program PNPM dan KUR berturut-turut hanya 1,08 persen dan 0,59 persen. Rendahnya tingkat akses rumah tangga miskin terhadap program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara belum optimal.

Gambar 5.9. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015



TABEL - TABEL

<http://malut.bps.go.id>

**Tabel L.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013-2015**

(dalam ribuan rupiah per kapita per bulan)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	251,45	258,97	269,07
Halmahera Tengah	335,15	346,75	361,98
Kepulauan Sula*	264,26	275,48	284,47
Halmahera Selatan	230,67	236,97	245,11
Halmahera Utara	184,49	188,47	195,09
Halmahera Timur	410,22	419,73	441,91
Pulau Morotai	200,02	205,12	211,63
Pulau Taliabu*	-	-	286,37
Ternate	418,47	434,06	459,55
Tidore Kepulauan	314,33	325,40	340,91
MALUKU UTARA	291,35	316,16	344,09

Keterangan:

- * Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel L.2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015**

(dalam ribuan jiwa)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	10,5	10,4	10,8
Halmahera Tengah	8,3	8,2	7,5
Kepulauan Sula*	13,0	12,6	9,0
Halmahera Selatan	12,9	12,7	10,1
Halmahera Utara	10,3	10,2	9,0
Halmahera Timur	13,3	13,3	13,3
Pulau Morotai	5,3	5,2	5,1
Pulau Taliabu*	-	-	3,6
Ternate	6,6	6,6	6,4
Tidore Kepulauan	5,5	5,5	5,2
MALUKU UTARA	85,6	84,8	79,9

Keterangan:

- * Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel L.3. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	9,78	9,56	9,69
Halmahera Tengah	17,44	16,88	15,23
Kepulauan Sula*	9,16	8,76	8,85
Halmahera Selatan	6,04	5,87	4,61
Halmahera Utara	5,90	5,74	4,99
Halmahera Timur	16,43	15,94	15,33
Pulau Morotai	9,18	8,74	8,39
Pulau Taliabu*	-	-	7,04
Ternate	3,24	3,16	2,99
Tidore Kepulauan	5,77	5,71	5,38
MALUKU UTARA	7,64	7,41	6,84

Keterangan:

- * Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel L.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi
Maluku Utara, Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	0,47	2,75	2,14
2012	0,08	1,14	0,85
2013	0,27	1,13	0,89
2014	0,40	1,44	1,16
2015	0,29	0,86	0,70

**Tabel L.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	1,20	1,41	0,75
Halmahera Tengah	1,89	2,50	2,21
Kepulauan Sula*	1,29	1,63	1,02
Halmahera Selatan	0,68	0,89	0,54
Halmahera Utara	0,51	0,73	0,42
Halmahera Timur	2,65	1,71	3,06
Pulau Morotai	0,71	0,40	0,47
Pulau Taliabu*	-	-	0,65
Ternate	0,08	0,26	0,23
Tidore Kepulauan	0,56	0,55	0,59
MALUKU UTARA	0,89	1,16	0,70

Keterangan:

- * Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel L.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	0,11	0,88	0,67
2012	0,01	0,20	0,14
2013	0,04	0,21	0,16
2014	0,07	0,31	0,24
2015	0,04	0,16	0,13

**Tabel L.7. Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,21	0,28	0,09
Halmahera Tengah	0,31	0,61	0,47
Kepulauan Sula*	0,26	0,44	0,21
Halmahera Selatan	0,14	0,19	0,09
Halmahera Utara	0,10	0,12	0,06
Halmahera Timur	0,54	0,31	0,84
Pulau Morotai	0,08	0,04	0,04
Pulau Taliabu*	-	-	0,17
Ternate	0,01	0,05	0,02
Tidore Kepulauan	0,08	0,09	0,12
MALUKU UTARA	0,16	0,24	0,12

Keterangan:

- * Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel L.8. Koefisien Gini Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 – 2015**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,223	0,249	0,234
Halmahera Tengah	0,257	0,339	0,322
Kepulauan Sula*	0,267	0,295	0,298
Halmahera Selatan	0,274	0,303	0,244
Halmahera Utara	0,253	0,312	0,291
Halmahera Timur	0,248	0,271	0,264
Pulau Morotai	0,315	0,288	0,269
Pulau Taliabu*	-	-	0,233
Ternate	0,254	0,293	0,245
Tidore Kepulauan	0,257	0,222	0,205
MALUKU UTARA	0.315	0.324	0.280

Keterangan:

* Kabupaten Pulau Taliabu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel L.9. Distribusi Pengeluaran Menurut
Kriteria *World Bank* Tahun 2015**

(dalam persen)

Kelompok Pendapatan	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaaan
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Bawah	22,10	23,37	22,52
40% Tengah	40,99	40,98	40,20
20% Atas	36,92	35,65	37,28

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Jl. Stadion No.65, Ternate, Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301
Homepage: <http://malut.bps.go.id> Email: malut@bps.go.id**



ISBN 978-602-6755-33-9



9 786026 755339